

Judul : DPR Usul Pinjaman Mahasiswa Bunga 0%
Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

DPR Usul Pinjaman Mahasiswa Bunga 0%

Sistem pembiayaan kuliah dapat diimplementasikan layaknya skema pinjaman kredit usaha rakyat, tetapi tanpa bunga.

DEVI HARAHAP
devi@mediaindonesia.com

PERSOALAN mahalnya biaya perkuliahan di perguruan tinggi belakangan ini kembali terangkat ke perbincangan publik. Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan di tengah masa perkuliahan.

Demi memberikan kemudahan sekaligus alternatif pembiayaan, beberapa perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) menggandeng penyedia pinjaman online (pinjol). Namun, langkah tersebut mendapatkan penolakan dari kalangan mahasiswa karena dinilai justru memberatkan.

DPR menangkap polemik tersebut sebagai dampak dari minimnya akses pembiayaan yang murah bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyarankan kampus-kampus berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) agar segera membuat konsep *student loan* atau pinjaman mahasiswa de-

ngan bunga 0% melalui kerja sama perguruan tinggi dan bank negara.

"Kuncunya bukan mencari keuntungan dari siswa, melainkan negara berinvestasi pada sumber daya manusia. Mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan, tanpa terbebani soal bunga, pinjaman," ucap Dede.

Menurut Dede, persoalan yang membelit mahasiswa seperti itu bukan hanya terjadi di ITB, melainkan juga UGM dan universitas lainnya. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang menyeluruh.

Dede mengatakan pihaknya akan segera membicarakan hal itu dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Sistem pinjaman mahasiswa dengan bunga 0% bisa diterapkan bagi perguruan tinggi jika ada *political will* dari pemerintah.

Pendanaan tersebut, kata Dede, diterapkan dengan memanfaatkan dana abadi pendidikan yang daya serapnya masih rendah. Sistem *student*

Penyebab Biaya Kuliah Terus Naik

- Meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan kampus tiap tahunnya.
- Aspirasi kampus untuk berbenah dan meraih predikat kelas dunia.
- Inflasi.

Skema Penawaran Cicilan Online UKT di Dana Cita

- Terdapat program cicilan 6 hingga 12 bulan pembayaran.
- Sistem bunga sebesar 1,75% per bulan.
- Proses pengajuan via aplikasi itu dilakukan tanpa down payment (DP) dan tanpa jaminan apa pun, layaknya aplikasi pinjol pada umumnya.

Beberapa Kebijakan yang Dapat Diterapkan untuk Meredakan Kenaikan Biaya Kuliah dan Dampaknya

- Perluasan akses terhadap beasiswa.
- Peningkatan peran pemerintah dalam pengelolaan biaya kuliah seperti pinjaman mahasiswa dengan bunga 0% bagi PTN-BH.
- Pengendalian biaya operasional kampus.
- Penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT).

Tinjauan Ulang Status PTN-BH

- Status PTN-BH dinilai sebagai pelepasan tanggung jawab pemerintah ke perguruan tinggi.
- Tantangan mengolah biaya pendidikan pada sistem PTN-BH meningkatkan risiko pemberhentian studi pada mahasiswa.
- Pemerintah harus mengevaluasi kembali berbagai perguruan tinggi dengan status PTN-BH yang bermasalah dalam mengelola sistem operasional mereka.

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

loan dapat diimplementasikan layaknya sistem pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), tetapi tanpa bunga.

Pt Dirjen Dikti, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek Nizam menekankan tidak boleh ada mahasiswa, khususnya di PTN-BH, yang tidak dapat melanjutkan kuliah karena

alasan ekonomi.

"Kami meminta agar pihak kampus mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa, serta untuk melindungi mahasiswa dari jeratan utang," kata Nizam.

Pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek telah me-

nyediakan dukungan dalam bentuk program kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah yang pada 2023 dianggarkan Rp11,7 triliun dan diberikan kepada 893.005 mahasiswa. Untuk 2024, alokasinya mencapai Rp13,1 triliun untuk 964.946 mahasiswa.

Diakui Nizam, alokasi tersebut belum mencukupi. Pemerintah pun berharap pihak kampus dapat menggandeng berbagai pihak, mulai alumni, duma usaha lewat program tanggung jawab sosial (CSR), hingga perbankan, untuk menyediakan skema pembiayaan yang ringan.

Tinjau ulang

Pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Cecep Darmawan meminta pemerintah mengevaluasi kembali PTN-BH yang bermasalah dalam mengelola sistem operasional.

Cecep mengatakan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri yang semakin meningkat merupakan konsekuensi Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Belajar itu mengubah status perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum publik yang otonom atau disebut PTN-BH.

"Artinya kampus diberikan hak penuh untuk melakukan komersialisasi dalam mengelola keuangan, tetapi PTN-BH jangan dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab pemerintah yang kemudian diserahkan seluruhnya ke perguruan tinggi," tandas Cecep. (AN/X-10)